

Analisis Bibliometrik Hubungan Media Massa dalam Sektor Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Database *Scopus* pada Abad 21

Kurniawan Muhammad

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang (UNISMA), Malang, Indonesia
Email Korespondensi: kurniawan.m@unisma.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara pengaruh media massa di sektor tata kelola. Penelitian ini menggunakan database Scopus selama abad ke-21 untuk mengumpulkan artikel dan konferensi makalah. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah "media massa" dan "pemerintahan". Data analisis adalah analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOS-viewer. Penelitian ini memvisualisasikan pola komunculan kata kunci. Studi ini mengungkapkan tren analisis media massa dan tata kelola yang meningkat signifikan dari tahun 2000. Aspek asli negara yang melakukan publikasi didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Berdasarkan visualisasi jaringan, media massa dan tata kelola memiliki dampak pada beberapa faktor, antara lain politik, daerah, kebijakan, manusia, dan masyarakat. Media massa, tata kelola, pendekatan kebijakan, dan pendekatan tata kelola terkait erat. Hasil ini menunjukkan bahwa "media massa" dan pemerintahan berpengaruh di banyak sektor, terutama dalam politik dan pembuatan kebijakan.

Kata kunci; Pemerintahan; media massa; politik; kebijakan; masyarakat

Abstract: This article aims to overview the relationship between mass media's effect in the governance sector. The research used the Scopus database over the 21st century to collect articles and paper conferences. The keywords used in this study are "mass media" and "governance". The analysis data was a bibliometric analysis using VOS-viewer software. This study visualized patterns of the co-occurrence of keywords. The study revealed a trend in the analysis of mass media and governance that has increased significantly from 2000. The original aspect of the country that conducts the publication is dominated by the United States and the United Kingdom. Based on the network visualization, mass media and governance have an impact in some factors, including politics, regions, policy, human, and society. Mass media, governance, policy approach, and governance approach are closely related. This result indicated that "mass media" and governance influence in many sectors, especially in politics and policy making.

Keywords: Governance; mass media; politics; policy; society

Article History:

Received; 01-10-2024; Revised; 22-11-2024; Accepted; 28-12-2024

PENDAHULUAN

Di era modern, media massa memainkan peran penting dalam berfungsinya masyarakat demokratis dan proses pemerintahan. Media massa, yang mencakup bentuk-bentuk tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio, serta platform digital yang sedang berkembang seperti media sosial, memiliki kemampuan unik untuk membentuk wacana publik, mempengaruhi keputusan politik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah (Happer & Philo, 2013). Dengan menyebarkan informasi dan menyusun isu, media memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang tindakan, kebijakan, dan lanskap politik



pemerintah. Munculnya media digital, khususnya media sosial, telah secara radikal mengubah cara informasi diproduksi dan dikonsumsi, meningkatkan kecepatan dan skala penyebaran pesan politik sekaligus memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam debat dan tindakan politik. Meningkatnya pengaruh media massa terhadap hasil politik menjadikannya bidang studi penting bagi para sarjana yang tertarik pada pemerintahan, kebijakan publik, dan komunikasi politik (Ausat, 2023; Happer & Philo, 2013; Pugu et al., 2024).

Tata kelola mengacu pada struktur dan proses yang melaluinya keputusan dibuat dan dilaksanakan dalam masyarakat. Tata kelola melibatkan interaksi lembaga pemerintah, aktor politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan penekanan pada akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi (Alexander et al., 1998; Cabral & Krane, 2018; Rummery, 2006). Dalam sistem pemerintahan demokratis, media dipandang sebagai alat penting untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tindakan dan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, dalam rezim non-demokratis, media massa mungkin dikontrol dengan ketat, seringkali berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Dalam kedua konteks tersebut, media tidak hanya memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik tetapi juga arah kebijakan dan pemerintahan dengan membingkai isu, menetapkan agenda politik, dan mempengaruhi prioritas kebijakan (Colomina et al., n.d.; Gugu & Dal Molin, 2016).

Meskipun pengaruh media terhadap pemerintahan telah diakui secara luas, namun pemahaman komprehensif mengenai dampaknya masih sulit dipahami. Kemajuan terkini dalam analisis data dan teknologi digital telah memfasilitasi metodologi baru untuk mempelajari hubungan ini. Salah satu pendekatan tersebut adalah analisis bibliometrik, suatu metode yang menggunakan data kuantitatif untuk menganalisis pola, tren, dan struktur penelitian ilmiah di bidang tertentu. Dengan mengkaji secara sistematis sejumlah besar publikasi akademik, teknik bibliometrik dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hubungan antara media massa dan tata kelola telah dikonseptualisasikan, dipelajari, dan diperdebatkan dari waktu ke waktu (Arifah et al., 2023; Fu et al., 2023).

Artikel ini menggunakan analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi wacana yang berkembang di media massa dan pemerintahan, serta memetakan lanskap intelektual di bidang tersebut. Laporan ini mengkaji karya-karya yang paling banyak dikutip, tema penelitian utama, dan pakar berpengaruh, yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana hubungan ini berkembang dan bergeser dalam konteks politik yang berbeda. Dengan mensintesis literatur terkini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tren dominan dalam penelitian akademis mengenai topik ini dan menyoroti bidang-bidang yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Temuan-temuan ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme media massa mempengaruhi tata kelola dan implikasi yang lebih luas terhadap pengembangan kebijakan dan akuntabilitas politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk mengumpulkan data. Basis data Scopus digunakan untuk mengumpulkan semua informasi relevan yang telah dipublikasikan tentang "media massa" Dan "pemerintahan". Data dikumpulkan pada 7th November 2024, dan periodenya dibatasi dari tahun 2000 hingga 2024. Jenis dokumen dianalisis, termasuk artikel



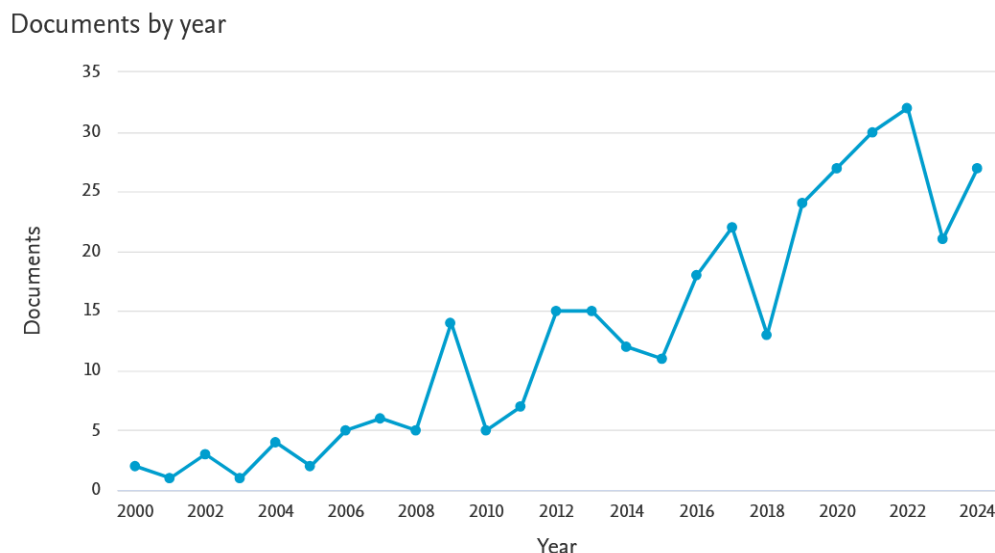
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

jurnal dan makalah konferensi. Untuk kata kunci detailnya "TITLE-ABS-KEY ("mediamassa" DAN "pemerintahan") DAN PUBYEAR > 1999 DAN PUBYEAR < 2025 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE , "cp"))". Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan VosViewer untuk memvisualisasikan teknik visualisasi persamaan dan kemunculan istilah (Putri et al., 2021; Suprpto et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Publikasi Global "media massa" dan "pemerintahan"

Penelitian ini menggali informasi data tentang “media massa” dan "tata kelola" berdasarkan database Scopus. Ditemukan 322 pasal yang membatasi waktu dari tahun 2000 (1 Januari 2000) hingga tahun 2024 (7th November 2024) dan ditentukan untuk artikel dan makalah konferensi. Berdasarkan data di Scopus, tren publikasi “media massa” dan “tata kelola” menunjukkan peningkatan pesat setiap tahunnya (Gambar 1). Data ini menunjukkan bahwa peneliti mempunyai peluang untuk melakukan penelitian tentang “media massa” Dan "pemerintahan".



Gambar 1. Penelitian Publikasi Catatan Data tentang “media massa” dan "pemerintahan" di Scopus Pada Abad ke-21.

Pada awalnya, jumlah publikasi di bidang ini bisa saja lebih tinggi, dengan kurang dari lima dokumen yang dihasilkan setiap tahun hingga tahun 2004. Setelah periode ini, peningkatan moderat mencapai puncaknya pada tahun 2012. Dari tahun 2016 hingga 2024, pertumbuhannya menjadi lebih besar lagi, dengan jumlah publikasi melebihi 30 pada tahun 2023. Fluktuasi tahunan dalam jumlah publikasi mencerminkan perubahan kebijakan dan isu-isu global yang berdampak pada penelitian dalam bidang ini. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan lonjakan minat yang signifikan terhadap “media massa dan tata kelola,” yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola di media massa. Peningkatan ini menggarisbawahi relevansi dan urgensi topik ini baik dalam bidang akademis maupun praktis.

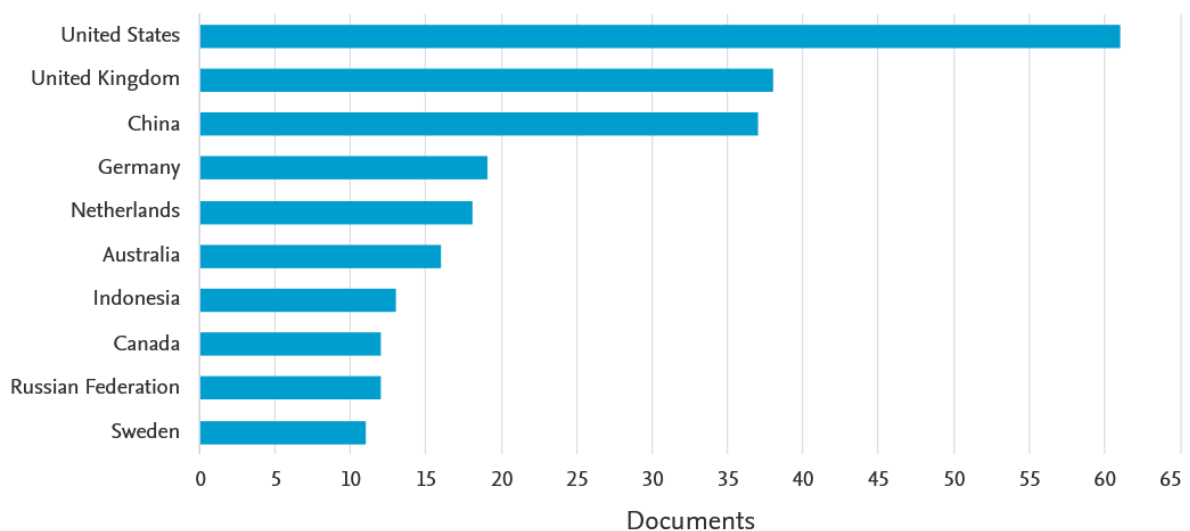


Kontributor Negara dalam Riset "media massa" dan "pemerintahan"

Negara dan institusi yang berkontribusi dalam “media massa” dan penelitian "pemerintahan" ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa 63 negara terlibat menghasilkan makalah untuk konferensi atau publikasi tentang "media massa" dan "pemerintahan". Untuk sepuluh besar, United States menduduki peringkat pertama dengan 61 artikel. Selanjutnya Indonesia berada di peringkat 7 dengan 13 makalah. Hal ini menunjukkan bahwa penulis di Indonesia mempunyai penelitian menarik mengenai hal tersebut.

Documents by country or territory

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.

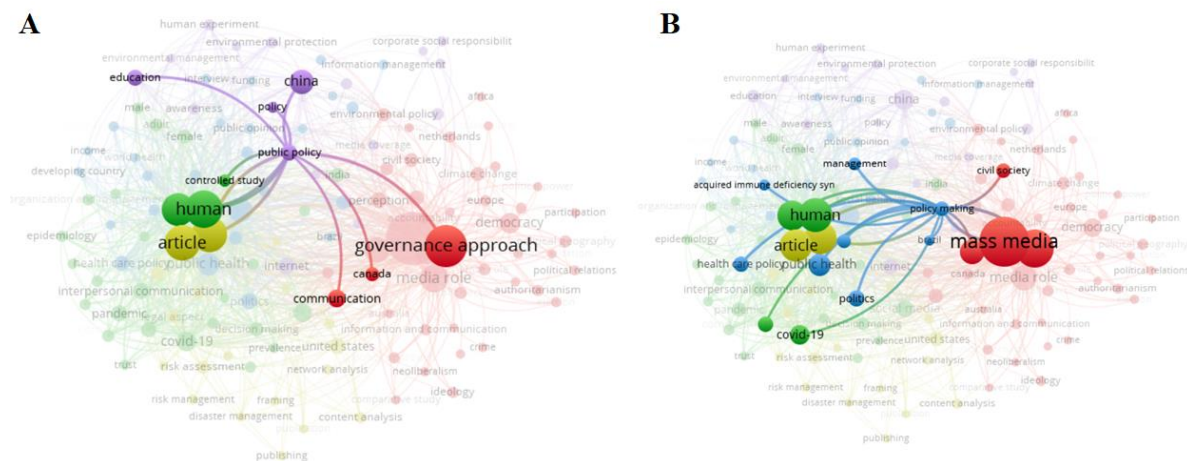


Gambar 2. Catatan Data Penelitian Publikasi Kontributor Negara-Negara Tentang Riset “media massa” dan "pemerintahan" Dalam Database Scopus pada abad 21.

Selain itu, dominasi negara-negara maju dalam penelitian mengenai media massa dan pemerintahan menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara-negara pertama yang menyadari hubungan signifikan dan dampak media massa terhadap pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi yang berasal dari negara-negara tersebut, yang mencerminkan keyakinan mereka akan relevansi dan perlunya penelitian komprehensif mengenai subjek ini. Penelitian semacam ini sangat penting untuk memahami dinamika antara media massa dan pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini tumbuh ketika informasi yang disebarkan oleh media massa mengenai tata kelola pemerintahan akurat dan transparan. Oleh karena itu, media massa berpotensi memainkan peran penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung pembentukan praktik tata kelola yang efektif (Mansoor, 2021).



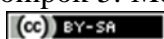
Klaster ini menyoroti topik-topik global seperti kerja sama internasional, pendidikan, kebijakan publik, dan negara-negara berkembang. Fokus ini menunjukkan pengaruh kebijakan internasional terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Interaksi cluster menunjukkan bahwa tema-tema seperti media massa, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik saling berhubungan dalam wacana akademik. Jaringan ini mencerminkan dinamika sosial, politik, dan kesehatan global. Kombinasi tema ini menunjukkan relevansi isu lintas disiplin dalam kajian kontemporer.



Gambar 4. Visualisasi Jaringan Kejadian Bersama Kata Kunci Kebijakan Publik (A) dan Pengambilan Kebijakan (B) dari Data Scopus tentang “media massa” dan “pemerintahan” Pada Abad-21.

Jaringan tersebut menunjukkan bahwa media massa dan pemerintahan mempunyai dampak pada beberapa faktor, antara lain politik, wilayah, kebijakan, manusia, dan masyarakat. Media massa, tata kelola, pendekatan kebijakan, dan pendekatan tata kelola mempunyai hasil yang berkaitan erat. Hal-hal tersebut masuk dalam cluster 1. Selanjutnya pengambilan kebijakan masuk dalam cluster 3, kemudian kebijakan dan kebijakan publik masuk dalam cluster 5. Walaupun berbeda cluster dengan media massa dan governance, namun masih terdapat kejadian dengan media massa dan/atau governance. (Gambar 4).

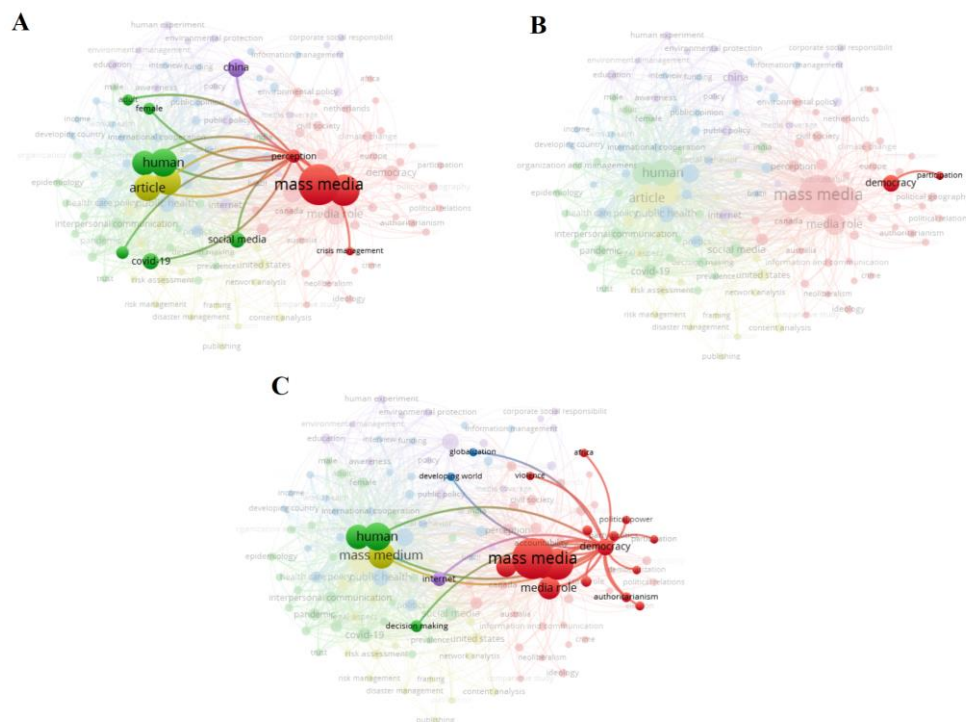
Pengaruh setiap topik dapat dianalisis melalui ukuran dan kepadatan cluster yang diamati pada hasil VOSviewer. Kelompok yang berlabel “Pendekatan Tata Kelola” dan “Media Massa” menonjol sebagai kelompok terbesar di setiap angka, yang menandakan bahwa kedua topik ini adalah yang paling berpengaruh dan sering dibahas. Sebaliknya, kelompok yang lebih kecil seperti “kebijakan publik”, “komunikasi”, dan “pendidikan” pada Gambar A, serta “pembuatan kebijakan”, “masyarakat sipil”, dan “kebijakan layanan kesehatan” pada Gambar B, mewakili topik-topik penting yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih spesifik atau terbatas. Jaringan tersebut menggambarkan dampak media massa dan pemerintahan terhadap berbagai faktor, termasuk politik, wilayah, kebijakan, masyarakat, dan masyarakat. Khususnya, media massa, tata kelola pemerintahan, pendekatan kebijakan, dan pendekatan tata kelola saling berhubungan erat dalam hasil penelitian ini, semuanya termasuk dalam kelompok 1. Selain itu, pembuatan kebijakan dikategorikan dalam kelompok 3, sedangkan kebijakan dan kebijakan publik ditempatkan dalam kelompok 5. Meskipun terwakili di berbagai kelompok,



masih terdapat interaksi antara media massa dan pemerintahan.

Keterkaitan antara istilah-istilah dalam kedua gambar ini menunjukkan bahwa topik-topik seperti kebijakan publik, komunikasi, dan kesehatan sering kali dibahas bersamaan dengan literatur dan penelitian. Keterkaitan erat antara kluster utama dan kluster pendukung menunjukkan bahwa pemerintah dan media massa berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, politik, dan manajemen krisis kesehatan (Garnham, 2020). Hasil analisis VOSviewer ini menekankan pentingnya sinergi pendekatan pemerintah dan media massa dalam membentuk kebijakan dan opini publik. Jaringan tersebut menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan publik dan pembuatan kebijakan berada dalam kelompok yang berbeda, interaksi dengan media massa dan pemerintah tetap signifikan, sehingga menunjukkan adanya keterhubungan yang erat dalam berbagai konteks yang mempengaruhi masyarakat secara luas.

Selanjutnya, kata kunci co-occurens yaitu persepsi, partisipasi, dan demokrasi dianalisis dalam penelitian ini (Gambar 5). Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana “media massa” dan “pemerintahan” dapat mempengaruhi kontribusi masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa persepsi dan demokrasi mempunyai korelasi dengan media massa dan pendekatan pemerintahan, namun tidak dengan partisipasi. Hal ini mungkin terjadi karena partisipasi mempunyai wilayah yang terbatas dibandingkan demokrasi.



Gambar 5. Visualisasi Jaringan Kejadian Bersama Kata Kunci Persepsi (A), Partisipasi (B), dan Demokrasi (C) dari Data Scopus tentang “media massa” dan “pemerintahan” di Abad ke-21.

Hasil visualisasi VOSviewer yang disajikan menunjukkan hubungan yang kuat antara kata kunci “media massa”, “peran media”, “demokrasi”, dan “partisipasi” dalam jaringan penelitian yang kompleks. Media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mempengaruhi perilaku sosial. Dalam konteks penelitian, media



massa sering kali diteliti untuk memahami dampak sosialnya, terutama bagaimana informasi disampaikan dan diterima oleh khalayak. Peran media mencakup spektrum fungsi yang luas, termasuk menyediakan informasi, memantau kekuasaan, mendidik masyarakat, dan memfasilitasi platform debat publik. Studi tentang peran media menyelidiki bagaimana media berkontribusi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi demokratis. Kaitan erat antara "media massa" dan "peran media" dalam visualisasi ini menunjukkan bahwa banyak penelitian yang berfokus pada pengaruh media terhadap dinamika sosial dan politik. Demokrasi, yang ditandai dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, sangat bergantung pada media massa untuk membekali warga negara dengan informasi yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat (Davis, 2020).

Selain itu, media juga berfungsi sebagai pengawas, menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan lembaga lainnya. Hubungan kuat yang diamati antara "media massa" dan "demokrasi" dalam visualisasi ini menunjukkan bahwa penelitian sering kali menggali bagaimana media massa dapat mendukung atau melemahkan proses demokrasi. Partisipasi mencakup keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan sosial. Media massa memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi ini dengan menawarkan platform wacana publik, menyebarkan informasi mengenai isu-isu penting, dan memobilisasi opini publik (David, 2022). Visualisasi ini menggambarkan seringnya korelasi antara "media massa" dan "partisipasi", yang menggarisbawahi pengaruh media dalam mendorong keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, visualisasi VOSviewer ini menekankan peran penting media massa dalam membentuk dinamika demokrasi dan memfasilitasi keterlibatan publik. Penelitian yang sedang berlangsung di bidang ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana media dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan demokrasi dan mendorong keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pers yang bebas dan independen dalam mempertahankan sistem demokrasi yang kuat dan partisipatif.

KESIMPULAN

Studi tersebut mengungkapkan adanya tren analisis media massa dan pemerintahan yang meningkat secara signifikan sejak tahun 2000. Aspek asli negara yang melakukan publikasi didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Berdasarkan visualisasi jaringan, media massa dan pemerintahan mempunyai dampak pada beberapa faktor, antara lain politik, wilayah, kebijakan, manusia, dan masyarakat. Media massa, tata kelola, pendekatan kebijakan, dan pendekatan tata kelola sangat erat hubungannya. Hasil ini menunjukkan bahwa "media massa" dan "pemerintahan" mempunyai pengaruh di banyak sektor, terutama dalam bidang politik dan pembuatan kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Malang (UNISMA) atas dukungan yang diberikan dalam pengembangan pelaksanaan penelitian ini.

Pernyataan *Conflic of interest*

Para penulis melaporkan tidak ada kepentingan yang bersaing untuk disampaikan.



REFERENSI

- Alexander, J. A., Comfort, M. E., & Weiner, B. J. (1998). Governance in Public-Private Community Health Partnerships: A Survey of the Community Care Network SM Demonstration Sites. *Nonprofit Management and Leadership*, 8(4), 311–332. <https://doi.org/10.1002/nml.8402>
- Arifah, F. H., Nugroho, A. E., Rohman, A., & Sujarwo, W. (2023). A Bibliometric Approach to Preclinical Studies of *Tinospora crispa* (L.) Hook. F. & Thomson as an Antidiabetic. *Indonesian Journal of Pharmacy*, 24–35. <https://doi.org/10.22146/ijp.4963>
- Ausat, A. (2023). The Role of Social Media in Shaping Public Opinion and Its Influence on Economic Decisions. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1, 35–44. <https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.37>
- Cabral, S., & Krane, D. (2018). Civic festivals and collaborative governance. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 185–205. <https://doi.org/10.1177/0020852315615196>
- Colomina, C., Margalef, H. S., & Youngs, R. (n.d.). The impact of disinformation on democratic processes and human rights in the world.
- David, Y. (2022). Public opinion, media and activism: the differentiating role of media use and perceptions of public opinion on political behaviour. *Social Movement Studies*, 21(3), 334–354. <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1875321>
- Davis, A. (2020). Media, democracy and social change: Re-imagining political communications.
- Fu, Y., Mao, Y., Jiang, S., Luo, S., Chen, X., & Xiao, W. (2023). A bibliometric analysis of systematic reviews and meta-analyses in ophthalmology. *Frontiers in Medicine*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1135592>
- Garnham, N. (2020). The media and the public sphere. In *The information society reader* (pp. 357-365). Routledge.
- Gugu, S., & Dal Molin, M. (2016). Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in Italy. *Administration & Society*, 48(2), 237–262. <https://doi.org/10.1177/0095399715581037>
- Happer, C., & Philo, G. (2013). The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change. *Journal of Social and Political Psychology*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.96>
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Narong, D. K., & Hallinger, P. (2023). A Keyword Co-Occurrence Analysis of Research on Service Learning: Conceptual Foci and Emerging Research Trends. *Education Sciences*, 13(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/educsci13040339>
- Pugu, M., Triolita, N., & Ar, M. (2024). NEW MEDIA AND THE CHANGING LANDSCAPE OF POLITICAL COMMUNICATION. 02, 1591–1605.
- Putri, C. R., Soleh, S. M., Saregar, A., Anugrah, A., & Susilowati, N. E. (2021). Bibliometric analysis: Augmented reality-based physics laboratory with VOSviewer software.



Journal of Physics: Conference Series, 1796(1), 012056. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1796/1/012056>

Rummery, K. (2006). Introduction: Themed Section: Partnerships, Governance and Citizenship. *Social Policy and Society*, 5(2), 223–225. <https://doi.org/10.1017/S1474746405002903>

Sorice, M. (2023). The role of media in exposing political corruption and its impact on democratic governance and societal development.

Suprpto, N., Prahani, B. K., & Deta, U. A. (2021). Research Trend on Ethnoscience through Bibliometric Analysis (2011-2020) and The Contribution of Indonesia. *Library Philosophy and Practice*, 2021.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.